

Prinsip *Good Governance* dalam Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Shania Auryn¹, Farid Agushyvana², Bagoes Widjanarko³

Universitas Diponegoro

e-mail : agushyvana@lecturer.undip.ac.id

ABSTRACT

A healthy lifestyle in Indonesia requires significant promotive and preventive efforts. Therefore, the President in 2017 instructed the Healthy Living Community Movement, organized simultaneously by cross-sectors. In implementing the policy, it needs to be in line with the principles of Good Governance. The purpose of this study was to analyze Transparency, Participation, Accountability, Effectiveness, and Efficiency, Responsiveness, Consensus. Method: Qualitative research with a narrative approach. Data collection by interview and document review. 12 informants (6 main informants, 6 triangulation informants) Results: Analysis of the Principles of Good Governance in the Healthy Living Community Movement Policy has been running but still not optimal problems and obstacles still exist in the process of implementing this policy. Conclusion: The implementation of the Community Movement has been carried out since the President's instruction until now, but it still requires good support from all cross-sectors of both the Government and the Community to support the success of the Healthy Living Community Movement Policy in West Kutai Regency.

Keywords : Good Governance, community, healthy living

ABSTRAK

Pola hidup sehat di Indonesia memerlukan upaya promotif dan preventif yang signifikan. Oleh karena itu, Presiden pada tahun 2017 menginstruksikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang diselenggarakan serentak oleh lintas sector. Dalam pelaksanaan kebijakannya perlu bersandingan dengan prinsip – prinsip *Good Governance*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi, *Responsiveness*, Konsensus. Metode : Penelitian Kualitatif dengan pendekatan naratif. Pengumpulan data dengan wawancara dan telaah dokumen. Informan berjumlah 12 orang (6 Informan Utama, 6 informan Triangulasi) Hasil : Analisis dari Prinsip – prinsip *Good Governance* dalam kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat telah berjalan tetapi masih belum optimal masalah serta hambatan masih ada dalam proses implementasi kebijakan ini. Kesimpulan : Implementasi Gerakan Masyarakat sudah dilaksanakan sejak penginstruksian Presiden hingga sekarang, akan tetapi masih memerlukan dukungan baik dari seluruh lintas sektor baik Pemerintah hingga Masyarakat untuk menunjang keberhasilan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kutai barat.

Kata kunci : *Good Governance*, Masyarakat, Hidup Sehat

PENDAHULUAN

Kecacatan dan kematian yang disebabkan oleh kasus Penyakit Tidak Menular dapat menyebabkan kehilangan sumber daya manusia dan produktivitas, yang berpotensi berdampak negative terhadap pembangunan sosial dan ekonomi (Indriyawati et al., 2019). Secara global, Penyakit Tidak Menular berkontribusi pada 70% kematian di seluruh dunia.

diperkirakan bahwa kasus akan terus meningkat secara global, terutama di negara-negara menengah dan miskin. Pada tahun 2030, Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan akan terjadi 52 juta kematian akibat penyakit tidak menular (WHO, 2018). Hasil riset Kesehatan Dasar 2018 (Riskesdas) menunjukkan bahwa prevalensi Penyakit Tidak Menular meningkat dibandingkan dengan tahun 2013, termasuk kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes dan hipertensi. Prevalensi kanker meningkat dari 1,4%

menjadi 1,8%, sedangkan tingkat stroke meningkat dari 7% menjadi 10,9%. Penyakit ginjal kronis juga mengalami peningkatan dari 2% menjadi 3,8%. Selain itu, hasil tes gula darah menunjukkan peningkatan prevalensi diabetes dari 6,9% menjadi 8,5%, dan hasil pengukuran tekanan darah menunjukkan peningkatan prevalensi dari 25,8% menjadi 34,1% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018a). Pada tingkat Provinsi menurut Laporan Riskedasa Kalimantan Timur Penyakit tidak menular pada asma memiliki 3,98%, Diabetes Melitus 2,26%, Hipertensi 10,57%, Penyakit sendi 8,12%. Penyakit tidak menular pada tingkat Kabupaten Kutai Barat asma 5,52%, Diabetes Melitus 1,34%, Hipertensi 11,33%, Penyakit Sendi 10,64% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018b).

Pemerintah telah melakukan implementasi Upaya pencegahan penyakit tidak menular melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2017 dengan menetapkan indikator 1. Meningkatkan aktivitas fisik 2. Meningkatkan perilaku sehat 3. Menyediakan pangan sehat dan memperbaiki status gizi 4. Meningkatkan pencegahan penyakit dengan deteksi dini 5. Meningkatkan kualitas lingkungan 6. Meningkatkan Pendidikan untuk hidup sehat. Instruksi Presiden tersebut mengarahkan semua instansi pemerintah dari tingkat pusat maupun daerah untuk mengembangkan kebijakan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang ada (Indonesia, 2017).

Dalam pelaksanaan kebijakan GERMAS, pemerintah memiliki peran penting sebagai pengawas dan pengevaluasi kebijakan. *Good governance* menjadi konsep penting dalam implementasi kebijakan GERMAS, di mana tata Kelola menekankan prinsip pengelolaan yang baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan GERMAS menerapkan pendekatan yang komperhensif untuk mendorong gaya hidup sehat,

melibatkan program berbasis masyarakat, promosi Kesehatan dengan focus yang lebih besar pada pencegahan dan perawatan primer. Dalam hal ini, pemantauan infrastruktur dan tenaga Kesehatan, serta mekanisme pelaporan akuntabilitas harus dijaga (Magnusson & Patterson, 2014).

Good governance memiliki peran penting dalam memajukan kebijakan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas efisiensi, dan responsif (Andi, 2021). Selain itu, *Good governance* juga berperan dalam melindungi kepentingan publik dan pemangku kepentingan dalam manajemen, serta memastikan bahwa suatu kebijakan atau layanan dapat mencapai tujuannya secara optimal (Jaziri et al., 2018).

Konsep *Good governance* menjadi hal penting dalam pelaksanaan kebijakan GERMAS, di mana tata Kelola menekan prinsip manajemen yang baik dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Pendekatan yang komperhensif dalam kebijakan GERMAS bertujuan mendorong gaya hidup sehat melalui program berbasis masyarakat, promosi Kesehatan. Hal ini melibatkan pemantauan infrastruktur dan tenaga Kesehatan, serta mekanisme pelaporan dan akuntabilitas yang efektif (Juiz, C., Guerrero, 2014).

Transparansi salah satu aspek dari prinsip *good governace* yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi dengan tepat dan tanpa Batasan yang memadai (McCollum et al., 2018). Efektivitas dari pemerintahan harus selalu dievaluasi untuk memastikan bahwa responsivitas terhadap masyarakat dijalankan tanpa hambatan. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap keputusan yang diambil (Sagan, 2021).

Dalam sektor Kesehatan, *Good governance* menuntuk dinas Kesehatan memainkan peran penting sebagai pemberi advokasi-regulasi dan pembinaan dalam mewujudkan Kawasan sehat. Selain itu, dinas Kesehatan juga harus aktif dalam membentuk kemitraan dan melibatkan masyarakat, serta menginisiasi

kampanye Gerakan hidup sehat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memastikan penyediaan fasilitas pelayanan deteksi dini penyakit yang bermutu (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2017).

Dalam implementasi kebijakan GERMAS di Kutai barat, terdapat permasalahan terkait prinsip *good governance* yang berkaitan dengan akuntabilitas berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti puskesmas menyatakan dalam pemenuhan pencapaian indikator GERMAS pelaksanaan kegiatan banyak dilakukan oleh pihak puskesmas yang terlibat langsung dengan masyarakat serta kurangnya kendali dari dinas Kesehatan terkait pelaksanaan GERMAS. Permasalahan pada *good governance* terdapat pada prinsip partisipasi, dimana puskesmas memainkan peran penting dalam tugas fungsional tidak terlibat dalam evaluasi forum GERMAS hanya struktur perangkat daerah yang tergabung dalam forum. Pada tingkat masyarakat partisipasi dalam masih lemah dilihat dari tingkat keaktifan masyarakat mengikuti kegiatan pemenuhan indikator. Selanjutnya belum diterapkan kawasan tanpa asap rokok terutama pada fasilitas pelayanan publik. Dinas Kesehatan sedang berupaya menerapkan prinsip – prinsip *good governance* dalam implementasi kebijakan GERMAS, dengan harapan dapat memperkuat nilai-nilai yang diinginkan dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan memberikan aspek fungsional yang efektif dan efisien pada instansi pemerintah terkait. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang telah ditetapkan akan memiliki dampak positif yang signifikan (Cahyani et al., 2020).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prinsip – prinsip *Good governance* dalam kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kutai Barat berjalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

Lokasi penelitian meliputi Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPEDDA), Pemerintah Kecamatan Linggang Bigung, Pemerintah Kecamatan Linggang Damai, Puskesmas Linggang Bigung, Puskesmas Linggang Damai. Data dikumpulkan menggunakan dua metode yaitu wawancara dan telaah dokumen pada periode akhir tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Kutai barat, terutama di Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Kutai barat dan dua kecamatan, yaitu kecamatan Linggang Bigung dan kecamatan Damai Kota. Teknis analisis data menggunakan content analysis meliputi pengumpulan data, analisis datam reduksi data, verifikasi data, kemudian penarikan kesimpulan.

Informan penelitian ini terdiri dari Informan utama dan Informan Triangulasi. Informan utama berjumlah 6 orang yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Assiten 1 Pemerintah, Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat, BAPEDDA, Kepala Dinas Kesehatan, Kasie. Promosi Dinas Kesehatan. Sedangkan informan triangulasi berjumlah 6 orang terdiri dari Kepala Kecamatan Damai Kota, Kasie. Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Damai Kota, Kepala Puskesmas kecamatan Damai, Kepala Kecamatan Linggang Bigung, Kasie. Pendidikan dan Sekolah Linggang Bigung, Kepala Puskesmas Linggang Bigung.

HASIL

Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini adalah Transparansi, Partisipasi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, Responsiveness, Konsesus.

Transparansi

Transparansi dalam Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup sehat meliputi Transparansi Sumber data, Informasi kegiatan, Akses informasi. Hasil wawancara dengan informan menyatakan

“...Menurut saya yaa untuk media kita ini mudah diakses walaupun untuk internet sering blank tetapi tetap semua warga kita bisa mengikuti melalui media elektronik, dan media cetak...”

“...kita secara untuk media cetak ada spanduk, balibo untuk secara media sosial kita biasanya di Facebook, Radio talkshow secara live, dan kedepannya kita punya rencananya SMS massal

misalnya tentang penanganan lansia rencananya akan kami kirim ke 1000 orang semoga rencana ini dapat diterima positif oleh masyarakat karena kami akan bekerjasama dengan Telkomsel...”

“... Untuk kecamatan kita ini gak begitu sulit ya secara media yang kami gunakan seperti biasa media cetak brosur, poster dan lain-lain. Untuk media sosial masyarakat kecamatan bigung ini tidak begitu susah masyarakatnya sudah dapat mengakses facebook, jadi kita dapat memberikan sosialisai juga dari situ...”

Dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat masih mengalami beberapa kendala sehingga belum dapat menyeluruh

“...Secara Media kami selalu menyediakan media cetak adanya spanduk atau poster yang berkaitan dengan GERMAS tetapi kami terkadang terkendala anggaran sehingga kami juga menggunakan media sosial facebook tetapi beberapa kampung di kecamatan Damai ini yang masih kesulitan dalam akses sinyal internet...”

Didapati forum GERMAS pernah terlaksana tetapi semenjak pandemi Forum Germas tidak dijalankan untuk saat ini, Hasil wawancara :

“...harus diaktifkan kembali forum GERMAS agar dapat melihat sejauh apa konsistensi program yang dijalankan mengingat forum ini sempat vakum...”

“...Kita memang pada saat ini berfokus pada Pandemi sehingga Forum GERMAS dimana kita dapat saling berdiskusi antar satu instansi dengan instansi lain terhambat dengan seiring berjalannya waktu terlupakan. Harapannya dapat segera kembali membuka forum GERMAS karena kita peraturan – peraturan sudah ada tapi terbalang dalam pelaksanaannya sehingga bentuk dari partisipasi OPD lain terbalangi...”

Partisipasi

Partisipasi dalam menyusun fokus program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dilakukan dinas Kesehatan dengan tim promosi Kesehatan dan pihak puskesmas dengan dilakukan pengambilan data Kesehatan masyarakat, hasil wawancara didapatkan :

“...ini bagian saya dan tim promkes karena kami yang memegang GERMAS biasanya kami menumpulkan data terlebih dahulu mengenai kesehatan dimasyarakat kita, data ini kami ambil dari puskesmas – puskesmas kutai barat dan diketabui stunting ini menjadi PR penting kami dek.. kalau melihat indikator GERMAS ya stunting ini masuk dalam upaya peningkatan gizi, setelah kami tahu bahwa stunting masih menjadi momok dimasyarakat kubur kami melihat lagi visi misi dari pak Yapan ternyata cocok dan pas dengan data kesehatan dimasyarakat kita. Sehingga sekarang saya dan tim promkes selain menghadapi pandemi masih berfokus pada lokus stunting karena ini merupakan bagian turunan dari GERMAS...”

Pada partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlihat pada pemenuhan indikator GERMAS seperti melaksanakan aktivitas fisik, wilayah KTR di kantor, pangan sehat belum sampai pada perumusan kegiatan GERMAS.

“...indikator GERMAS inikan cukup banyak ya dan semua memang sudah dijalankan oleh dinas kesehatan ataupun DPMK tetapi yang menjadi fokus menurut saya ya peningkatan gizi karena sesuai dengan visi misi bapak Bupati kita, makanya saya itu selalu menegaskan kalau ada pertemuan kita harus memperhatikan gizi anak-anak kita salah satu sumber untuk mencegah stunting dan kami juga menyekolahkan anak – anak ini supaya bisa nanti bersaing dengan kabupaten lain...”

“...saya ingat sekali ketika masih sering aktif GERMAS awal disitu ada larangan merokok hingga dikantor juga jadi dilarang merokok, dari situ juga saya berhasil berhenti dek, selain itu kami bagian kesra juga menghimbau tidak ada merokok di rumah ibadat dan kami juga mendukung kegiatan olahraga pemuda di kutai barat...”

PKK Kabupaten merupakan OPD yang paling aktif dalam membentuk kegiatan

GERMAS dengan membentuk senam bersama atau kegiatan lomba sehat, selanjutnya PKK juga menghimbau pertemuan kedinasan untuk menyediakan konsumsi pangan sehat.

“...kami sangat mendukung upaya GERMAS salah satunya indikator aktivitas fisik, itukan peregangan tiap 1 jam selama 10 menit karena kamikan bekerjanya duduk ya dan badan kaku, ini diterapkan oleh seluruh instansi. Dulu sebelum ada pandemi dek kami rajin senam bareng entah didepan kantor bupati itu pasti ada, untuk sekarang ya terbenti tetapi menggunakan masker ini juga bentuk dukungan kami dalam GERMAS, selain itu ibu bupati sebagai ibu pkk kutai barat itu banyak dek memberikan dukungan baik dengan adanya senam bersama ataupun kegiatan yang nanti himbauannya makan makanan sebat seperti pisang rebus, ubi – ubian yang akhirnya menjafi suatu kebiasaan untuk kami setiap ada pertemuan...”

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat meliputi tanggung jawab lintas sektor terkait tugas dan wewenangnya dalam menyukseskan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, hasil wawancara didapatkan :

“... GERMAS ini ada INPRESnya.. langsung dari instruksi Presiden.. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sangat amat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan programnya tetapi tetap harus mengevaluasi kegiatan yang ada pada tiap OPD terkait...”

“...Secara tanggunjawab baik dari petugas di Dinas Kesehatan sampai petugas lapangan di puskesmas dan pustu berjalan dengan amat baik dan melaksanakan setiap tugasnya untuk menyukseskan GERMAS ini...”

Secara menyeluruh Kabupaten Kutai Barat telah menjalankan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat baik dari Pusat Daerah hingga tingkat Kecamatan, tetapi memerlukan evaluasi capaian keberhasilan kegiatan atau program, hasil wawancara menyatakan :

“...Salah satu kekurangan kita tidak mengukur keberhasilan program yang diterapkan mungkin yang sudah mengukur Program – program mereka adalah Dinas Kesehatan...”

“...Kalan dari segi kebijakan sebenarnya telah sesuai, tapi kita tidak pernah ada evaluasi yang secara menyeluruh tentang OPD melakukan kegiatan apa

saja dan tingkat keberhasilannya seperti apa itu belum sampai...”

“... Kalau dari kami Dinas kesehatan yad ek sudah terukur, karena tiap petugas kita di lapangan ini punya tugasnya masing – masing sesuai dengan indikator yang ada. Tetapi kalau kita bahas kepada Indikator dari OPD terkait jawabannya belum. Kita tidak punya instrument untuk mengetahui OPD mana saja yang sudah menjalankan program turunan GERMAS...”

Efektivitas dan efisiensi

Efektifitas dan efisiensi dalam kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat meliputi Sumber daya salah satunya sumber daya anggaran dan manusia hasil wawancara dengan informan didapatkan :

“...Terkait anggaran GERMAS ini berkaitan dengan SIPD dan dapat diakses secara umum dan dibebankan pada APBD, dan seluruh anggaran GERMAS tahun ini kita fokuskan ke covid-19...”

“...Untuk mendukung SDM kita harus meningkatkan standar – standar kompetensi petugas kita seperti peningkatan pengetahuan dengan pelaksanaan pelatihan...”

Selain Sumberdaya Manusia dalam Sarana dan Prasarana mendukung dalam prinsip efektivitas dan efisiensi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Hasil wawancara :

“...Sarana dan prasarana salah satunya ini kita punya mobil khusus GERMAS, lalu didepan ini dapat dilihat tempat untuk mencuci tangan pada masa pandemi ini juga bagian dari upaya GERMAS...”

“...Kemaren waktu masa awal – awal pandemi mobil ini kita gunakan berkeliling kecamatan mempromosikan Tindakan awal pencegahan penularan Covid-19. Selanjutnya tiap kantor memiliki banyak tempat untuk mencuci tangan...”

“...Salah satu sarana prasarana pelaksanaan GERMAS itu Alun – Alun ITHO karena jujur kegiatan masyarakat di Alun – alun ini banyak remaja sampai anak – anak bisa mengembangkan potensi olahraga mereka paling sering itu senam bersama, atau jogging disekitar area Pemkab ataupun berolahraga menggunakan sepeda, ini adalah bentuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah...”

Sarana dan prasarana pada beberapa daerah mengalami sedikit hambatan dalam beroperasi, hasil wawancara didapatkan :

“...Pustu ini merupakan sarana untuk masyarakat apalagi yang aksesnya jauh memang telah ada disetiap

kampung, tetapi petugas kesehatan pada pustu ini sangatlah kurang mengingat beberapa jalan untuk kesetiap kampung mempunyai medan yang berbeda – beda ada yang jalannya rusak parah dikarenakan banyak truck sawit lewat..”

Responsif

Responsif dalam kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat meliputi aspirasi masyarakat dan diketahui baik dari pemerintah daerah hingga tingkat puskesmas menerima dengan sangat baik saran dan kritik, tetapi selama berjalannya program GERMAS belum ada keluhan yang masuk.

“...Untuk keluhan dan saran kami sangat amat terbuka baik ini disampaikan lewat forum atau kotak yang sudah disediakan didepan pada web khusus. tetapi sejauh ini tidak ada keluhan ataupun saran dalam program GERMAS...”

“...Keluhan biasanya akan langsung disampaikan masyarakat pada saat sosialisasi bila dapat kita luruskan kesalahpahaman yang ada akan langsung diselesaikan...”

Kondisi *Culture*, ekonomi, masyarakat juga harus diperhatikan oleh petugas dalam sosialisasi program turunan Gerakan Masyarakat Hidup dan hasil wawancara didapatkan :

“...Melihat tingkat kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi tingkat kesehatan, untuk masyarakat yang punya kesadaran cukup tinggi tentang lingkungannya maka biasanya tingkat kesehatan mereka juga cukup baik tetapi, ada juga masyarakat kita yang cukup lemah dalam kesadaran kesehatan secara lingkungannya mungkin fokus mereka lebih pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari...”

“...Kultur budaya kita ini cukup kuat sehingga perlu pemahaman satu arah. Pemahaman yang dimaksud ini kita dapat memberikan pengertian dampak positif dari program dengan bahasa daerah sangat berguna dan mudah dimengerti, rasa keakrabannya itu ada...”

Konsensus

Konsensus dalam kebijakan Gerakan masyarakat Hidup Sehat dukungan dari *stakeholder* dalam menyukseskan kebijakan program Pemerintah, Hasil wawancara didapatkan :

“...Kampanye GERMAS ini juga dilakukan DPRD jadi ada waktunya mereka harus hiring mungkin dengan Dinas Kesehatan. Seharusnya setiap dinas yang punya program yang mungkin terkait GERMAS bisa memberikan keluhan – keluhannya pada para anggota dewan anggarannya kecil atau bagaimana, tetapi sejauh ini memang belum ada...”

“...Sektor swasta banyak membantu baik dari Perusahaan hingga pada Bank – Bank yang ada di Kutai Barat salah satunya kemaren waktu awal – awal Covid-19 masuk kita dibantu dalam hal persiapan deksinfektan, masker dan kebutuhan - kebutuhan lainnya...”

Untuk menghindari penyalahgunaan dalam program-program kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendukung pemberian sanksi. Hasil wawancara sebagai berikut “

“...Untuk tupoksi sebenarnya sudah jelas. Untuk sanksi pada kecurangan kepegawaian itu perlu adanya evaluasi kita dapat memanggil Kepala Dinas teknis kenapa program A atau B tidak dapat berjalan kendalanya apa ? sedangkan program GERMAS inikan adalah Intruksi Presiden harus dapat melaksanakannya dengan kondisi apapun...”

“...Untuk mengawasi sudah langsung diawasi oleh mekanisme pengawasan Pemerintah Kutai Barat. Kita ada Audit eksternal Inspektorat audit internal BPK diluar itu pengawasan setiap OPD identifikasi resiko, sehari – hari kita bekerja juga harus membangun kultur yang baik dan nyaman...”

PEMBAHASAN

Transparansi

Pemerintah Daerah Kutai barat telah berhasil menerapkan prinsip transparansi dalam menyediakan informasi terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, hingga tingkat kecamatan. Media cetak dan elektronik dimanfaatkan dengan baik, menyajikan informasi yang edukatif dan menarik dengan menggunakan Bahasa, gambar, dan warna yang menarik. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penggunaan media dan kreativitas yang beragam dalam kampanye kesehatan ternyata lebih menarik minat masyarakat (Nadhirah & Wirasari, 2020). Dengan adanya pemanfaat media cetak seperti

poster, brosur, dan leaflet membantu mempermudah masyarakat dalam membaca informasi kapan pun dan dimanapun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media cetak promosi kesehatan memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi (Manalu et al., 2020)

Namun, dalam wawancara peneliti dengan informan menemukan bahwa adanya beberapa hambatan terkait penggunaan media cetak dalam upaya memberikan informasi terkait gerakan masyarakat hidup sehat, hambatan ini terkait keterbatasan anggaran yang ada dalam menyediakan media cetak. Sebagai alternatif, puskesmas beralih menggunakan media sosial sebagai pemberian informasi sejalan dengan ini penelitian lain menyebutkan salah satu faktor yang tidak dimiliki semua puskesmas adalah belum adanya peraturan yang menetapkan standar anggaran minimal untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi Kesehatan (Paramita et al., 2018).

Pemberian informasi secara tidak langsung melalui media sosial meringankan pemerintah terutama adanya pembatasan dalam bertemu di era pandemic ini. Akan tetapi peneliti mendapat penggunaan media sosial sebagai informasi di Kutai barat masih belum dapat berjalan optimal dikarenakan akses internet yang belum memadai. Sekitar 80 kampung masih berada dititik buta sinyal internet. sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mendapati kekurangan penggunaan media sosial dikarenakan adanya kesulitan pada signal internet menyebabkan pengjangkauan audiens menjadi pasif, dan menyebabkan beberapa informasi tidak akurat (Maydianasari & Ratnaningsih, 2021).

Kegiatan informasi antara dinas Kesehatan dan puskesmas dalam kebijakan Gerakan masyarakat hidup sehat berjalan lancar, akan tetapi kegiatan komunikasi antar lintas sektor dalam perumusan kebijakan Gerakan masyarakat hidup sehat di Kutai barat masih belum berjalan dengan optimal, diketahui forum Gerakan masyarakat hidup sehat yang merupakan forum diskusi hanya pernah

dilakukan satu kali saat pertama kali ditetapkan, selanjutnya pun forum tidak aktif hingga memasuki pandemi, dengan ini komunikasi antar lintas sektor dan program di Kutai barat masih harus dibenahi sehingga kebijakan Gerakan masyarakat hidup sehat berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komunikasi pemerintah berperan sebagai penghubung structural kinerja antar organisasi (Gustian et al., 2019).

Partisipasi

Prinsip partisipasi memastikan suatu usaha kebijakan dijalankan semua sektor dan dapat menciptakan budaya partisipasi organisasi (Wajdy et al., 2023). Partisipasi dalam penyusunan program gerakan masyarakat hidup sehat yang ditemukan peneliti melibatkan kerjasama antara dinas kesehatan dengan *stakeholder* dalam menyusun program gerakan masyarakat hidup sehat yang menjadi fokus utama daerah. Tahapan pelaksanaan advokasi yang dilakukan dinas kesehatan dan puskesmas dimulai dengan penjabarkan isu masalah, dilanjutkan pengumpulan data primer dan sekunder serta dilakukan pengkajian. Kebijakan gerakan masyarakat di Kutai barat mengadopsi strategi kegiatan provinsi kalimantan timur yang berfokus pada peningkatan indikator. Selain itu, visi-misi Bupati Kutai barat sejalan dengan salah satu indikator gerakan masyarakat hidup sehat yaitu percepatan perbaikan gizi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan para pemimpin dalam pengambilan keputusan advokasi kesehatan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dengan adanya kemudahan sarana, tenaga, anggaran, partisipasi masyarakat dan upaya lainnya (Khumairah et al., 2022).

Partisipasi perangkat daerah dalam implementasi Gerakan masyarakat hidup sehat di Kutai barat terlihat pada pelaksanaan pemenuhan

indikator gerakan masyarakat sehat dimana dalam penelitian ini diketahui perangkat daerah menerapkan himbauan – himbauan GERMAS yang diberikan, adanya penerapan peregang tubuh saat bekerja, himbauan penyediaan buah dan sayur sebagai pangan sehat saat rapat koordinasi berlangsung, selanjutnya pemerintah Kutai barat diketahui telah menetapkan area tanpa asap rokok baik di area pemerintahan daerah hingga area kecamatan dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Dengan adanya partisipasi dan dukungan dari perangkat daerah dalam penetapan indikator gerakan masyarakat hidup sehat ini dapat menjadi budaya kebiasaan pegawai yang nantinya terbawa hingga pada lingkungan keluarga dan sekitarnya. Sejalan dengan penelitian yang menyebutkan penerapan seperti kawasan tanpa asap rokok pada kantor–kantor, terutama pelayanan publik dimana masyarakat yang berkunjung dalam berbagai macam rentang usia dan kemungkinan rentan terhadap pengaruh asap rokok, sehingga perilaku merokok didalam ruangan pelayanan masyarakat harus dibatasi (Noviyanti et al., 2021).

Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas memastikan pemerintah bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan berjalan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Dalam penelitian ini diketahui Kebijakan Gerakan masyarakat hidup sehat di Kutai barat telah berjalan dan memiliki peraturan yang tertuang dalam PERBUP Nomor 24 tahun 2018 tentang Gerakan masyarakat hidup sehat. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya hanya dijalankan oleh beberapa perangkat daerah dan stakeholder. Dinas Kesehatan dan puskesmas menunjukkan kolaborasi yang efektif dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan terkait Gerakan masyarakat hidup sehat. Berdasarkan laporan kinerja Kesehatan masyarakat secara nasional tahun 2021 Provinsi Kalimantan timur mencapai 68% dengan Kutai barat berada pada urutan kelima

dari tujuh kabupaten(Departemen Kesehatan, 2022). Meskipun Kutai barat dinilai efektif namun masih memerlukan komitmen dan koordinasi terutama pada lintas sektor sebagai mitra kebijakan, sebagaimana penelitian sebelumnya mendapati koordinasi organisasi perangkat daerah memastikan adanya pemahaman peran terkait pelaksanaan, dan pencapaian target serta memudahkan proses monitoring dan pengawasan pemenuhan kriteria(Pramudita, Renata Winna. Megawati, 2023).

Terkait dengan akuntabilitas perangkat daerah sebagai lintas sector kebijakan Gerakan masyarakat hidup sehat Peneliti mendapati bahwa lintas sektor tidak terlibat secara aktif dalam proses administratif GERMAS yang diatur PERBUP nomor 24 tahun 2018, dengan alasan kurangnya pemahaman terhadap peran mereka dalam implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan audit kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas melalui identifikasi masalah, mengidentifikasi potensi ketidakefisienan, mengevaluasi system pengendalian internal, membangun saluran komunikasi antara manajemen dan tingkat operasional, serta melaporkan setiap ketidakefisienan yang ditemukan(Maranjaya, 2022)

Pelaksanaan monitoring kinerja perangkat daerah dalam GERMAS masih belum menyeluruh dikarenakan tidak semua perangkat daerah membuat rencana aksi terkait GERMAS, dengan kondisi ini Dinas kesehatan mengalami kesulitan untuk memonitor kemajuan capaian secara berkala dan juga tidak dibuatnya instrumen baku sebagai alat ukur pada perangkat daerah Sebuah penelitian mengemukakan berpengaruhnya pencapaian kinerja yang dengan tingkat keputusan subunit dalam pelaksanaan kebijakan didukung dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) (Rahmadani et al., 2021)

Efektifitas dan efisiensi

Efektifitas dan efisiensi meliputi pemanfaatan Sumber daya, peneliti mendapati adanya pemanfaatan sumber

daya anggaran dan manusia sampai sarana dan prasarana. Berdasarkan wawancara pemerintah daerah memberikan pembinaan pada petugas sebagai implementor GERMAS harapannya pengetahuan akan pembaharuan kesehatan mengalami perkembangan.

Sumber daya penganggaran pembiayaan kegiatan GERMAS tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kutai barat tahun 2021. Dinas kesehatan berupaya mengefektifkan pemanfaatan sumber daya anggaran untuk menunjang sumber daya manusia, terlihat dengan adanya optimalisasi pembinaan pada petugas promosi kesehatan pada puskesmas di Kutai barat. Pengelolaan sumber daya anggaran yang tepat berpengaruh signifikan terhadap perencanaan suatu program kegiatan sehingga efektivitas sumber daya manusia kinerja berjalan dengan baik (Anandah, Nina Anggani. Aufa, 2023). Dengan ini pemerintah menunjukan upaya mendukung isu kompetensi petugas dalam implementasi kebijakan kesehatan. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa SDM menjadi modal utama dan faktor pendukung dalam membantu meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan sedangkan komitmen pemerintah harus mampu bekerja sama (Nopiani, 2019).

teori *good governance* sarana harus mempertimbangkan luas lingkup kebijakan sehingga dapat memastikan adanya kesamaan, kesempatan, dan kesetaraan (Feisal, 2003). peneliti mendapati sarana dan prasarana penunjang kebijakan Gerakan masyarakat hidup sehat di Kutai barat adanya penyediaan fasilitas umum yang digunakan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat yaitu Alun – alun itho, selanjutnya disediakan tempat mencuci tangan pada setiap instansi perkantoran, disediakannya mobil GERMAS, selanjutnya pembangunan puskesmas pembantu telah disediakan pada kampung – kampung. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di Kutai barat berjalan dengan baik mulai dari penyediaan dan pengembangan fasilitas umum yang melibatkan masyarakat dalam pemenuhan indikator,

inovasi sarana promosi GERMAS yang tidak hanya menggunakan media cetak atau media sosial, tetapi kendaraan yang dapat menjangkau kampung yang cukup jauh. Pada fasilitas kesehatan di beberapa kampung terpencil yang memiliki akses jalur kendaraan cukup sulit tersedia puskesmas pembantu yang dilengkapi dengan alat – alat pemeriksaan penunjang hanya saja pemenuhan obat – obatan yang masih harus didistribusi oleh petugas. Penelitian sebelumnya mendapati persoalan dalam sarana pada kampung terpencil yaitu aksesibilitas menuju lokasi yang membutuhkan tenaga serta pembiayaan yang cukup besar (Ibrahim & Sutrisno, 2023)

Responsifitas

Dalam teori *Good governance* prinsip *responsiveness* merupakan kemampuan pemerintah dalam merespon perubahan yang terjadi didalam masyarakat dan dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sehingga selaras dengan kebijakan yang berjalan (OECD, 2009). Kebijakan GERMAS dalam implementasinya tidak lepas dari kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian ini didapati Adanya penyerapan aspirasi ini menunjukan partisipasi masyarakat dan rasa kritis terhadap keberlangsungan program, masuknya keluhan dan saran saat sosialisasi akan direspon oleh petugas lapangan dan kemudian disampaikan pada dinas kesehatan yang dapat dilihat isu strategisnya kemudian. Adapun sejauh ini belum ada keluhan yang diterima oleh petugas, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah daerah mengenai implementasi kebijakan GERMAS. Penelitian terdahulu juga mendapati penyerapan aspirasi akan dimulai dari petugas lapangan yang berkoordinasi dengan masyarakat dan mencari solusi bersama, kemudian bilamana selesai atau tidaknya diskusi akan tetap didokumentasikan dan dilanjutkan hingga pada pemegang kebijakan yang nantinya dapat disampaikan dalam rapat forum bersama (Firdaus & Ma'ruf, 2021).

Dalam implementasi Gerakan masyarakat hidup sehat respon masyarakat menjadi suatu tolak ukur keefektifan kebijakan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dalam implementasi GERMAS yang sudah berjalan mendapati respon kooperatif dari masyarakat. Penelitian mendapati responsifitas masyarakat saat berpartisipasi pada kegiatan seperti senam bersama, lomba senam, ataupun kegiatan – kegiatan berkaitan dengan pencapaian indikator Gerakan masyarakat sehat, hambatan merupakan hal yang selalu muncul dalam proses pelaksanaan, dan suatu hambatan tertentu dapat menjadi isu strategis yang akan mendapatkan perhatian dari pemerintah (Puluhulawa, 2013). Adanya perbedaan status sosial, ekonomi, pendidikan sering kali menyebabkan ketidaksamaan setiap individu dalam menilai atau memprioritaskan sesuatu. Situasi ini menjadi salah satu isu dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kutai barat dalam upaya peningkatan kebijakan Gerakan masyarakat hidup sehat.

Kesehatan dan kebudayaan merupakan elemen yang muncul ketika berbicara mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dan petugas kesehatan sangat penting dalam menjalin kemitraan secara stimulan guna memastikan kelestarian budaya lokal terjaga dan kesadaran akan pola hidup sehat meningkat. Pemerintah Kutai barat mengadopsi pendekatan penggunaan bahasa daerah dalam sosialisasi GERMAS sehingga tidak ada kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat selama pelaksanaan. sejalan dengan penelitian sebelumnya mendapati pemberian edukasi kesehatan dengan menggunakan bahasa daerah dapat meningkatkan kepatuhan dan pencegahan penyakit (Lolo et al., 2022).

Konsensus

Adanya prinsip konsensus memastikan pemerintah berperan sebagai regulator yang komunikatif melalui Upaya teknis musyawarah untuk mengatasi kendala yang muncul dan menemukan solusinya.

Peneliti mendapati adanya keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan sektor swasta dalam implementasi Gerakan masyarakat hidup sehat di Kutai barat. Keterlibatan dua sector ini terlihat dengan diadakannya pelaksanaan indikator aktivitas fisik dalam bentuk kegiatan senam dan lomba senam sehat. Selain itu, peneliti mendapati. adanya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam melaksanakan kegiatan indikator GERMAS. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan kegiatan senam bersama dengan hadiah menarik yang meningkatkan antusiasme masyarakat Kutai barat. Selain itu, perusahaan – perusahaan swasta juga memberikan dukungan untuk GERMAS dengan menyediakan sarana perlindungan diri seperti *hand sanitizier* dan masker medis guna mencegah penularan *Covid-19*. hal ini menunjukkan adanya dukungan pihak eksternal dalam mencapai implementasi yang efektif terutama yang tertuang dalam Peraturan Bupati No 24 tahun 2018 tentang Gerakan masyarakat hidup sehat (Bupati, 2018)

. Dalam konteks *governance* kesepakatan mengenai mekanisme kebijakan dibuat bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Feisal, 2003). sistem demokrasi yang dijalankan oleh anggota dewan sebagai wadah perangkat daerah pelaksana GERMAS memungkinkan untuk menyampaikan saran atau keluhan terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kebutuhan sumber daya langsung kepada anggota dewan namun, hingga saat ini, belum ada keluhan yang disampaikan oleh perangkat daerah mengenai kebijakan GERMAS. Pemerintah berperan sebagai katalisator dengan memfasilitasi berbagai kepentingan sehingga menjadi kesepakatan bersama, dan sejauh suatu program diterapkan sangat jarang mendapati keluhan dari perangkat pelaksana (Maranjaya, 2022)

Prinsip konsensus menjamin adanya formulasi sanksi yang berupa teguran terhadap perangkat daerah jika kebijakan tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti mendapati sejauh berjalannya kebijakan Gerakan

masyarakat di Kutai barat belum terdapat pelaporan khusus penyelewengan terkait anggaran kegiatan Gerakan masyarakat hidup sehat, ataupun penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pelaksanaannya. Pemerintah Kutai barat sendiri menyatakan memberlakukan sanksi terkait kebijakan Gerakan masyarakat hidup sehat berupa sanksi pemanggilan dan administrative, dan dapat berkembang menjadi penyelidikan menyeluruh oleh pihak yang berwenang jika ditemukan adanya tindakan kecurangan lebih lanjut. Dengan adanya sanksi seperti denda administratif, diharapkan petugas dapat memfokuskan diri pada tugas dan kewajiban mereka untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan GERMAS. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tata kelola yang baik harus mencakup mekanisme sanksi terhadap tindakan kecurangan yang melibatkan dana publik dan penerapan undang – undang administratif(Widiowati & Pramutanto, 2021).

KESIMPULAN

Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kutai Barat sudah berjalan dari 2017 dan masih berproses hingga sekarang, hambatan – hambatan Gerakan masyarakat hidup sehat belum tersebarnya sumber daya manusia yang merata, Partisipasi serta persepsi masyarakat yang masih kurang optimal menjadi tugas penting bagi *stakeholders* terkait, sarana dan prasarana yang masih harus ditunjang lebih baik, serta masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas sarana-prasarana yang disediakan. Koordinasi antar OPD perlu dioptimalkan, dukungan dan peran aktif dari Bupati hingga pemegang kebijakan dapat memberikan motivasi bagi para pelaksana dan kelompok sasaran. Keterlibatan seluruh komponen baik dari masyarakat hingga pemerintah daerah perlu ditingkatkan demi mencapai tujuan penyuksesan kebijakan Gerakan masyarakat hidup sehat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Diponegoro yang telah mendukung sehingga penelitian ini dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik. atau membantu penelitian dituliskan dengan jelas

REFERENSI

- Anandah, Nina Anggainsi. Aufa, M. (2023). Pengaruh perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap efektivitas kinerja pemerintah daerah kabupaten gresik. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, IV(1), 1–7.
- Andi, N. S. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.59>
- Bupati, K. B. (2018). *Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 24 tahun 2018 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Kutai Barat*.
- Cahyani, D. I., Kartasurya, M. I., & Rahfiludin, M. Z. (2020). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam Perspektif Implementasi Kebijakan (Studi Kualitatif). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(1), 10. <https://doi.org/10.26714/jkmi.15.1.2020.10-18>
- Departemen Kesehatan. (2022). Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ditjen kesehatan masyarakat th 2021. In *Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan*. http://www.kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_60248a365b4ce1e/files/Laporan-Kinerja-Ditjen-KesmasTahun-2017_edit-29-jan-18_1025.pdf
- Feisal, T. (2003). *Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Pemerintah Yang Lebih Baik*.
- Firdaus, M. R., & Ma'ruf, M. F. (2021). Partisipasi Masyarakat Melalui Program Gerakan Membangun Masyarakat Sehat Pada Pelayanan Kesehatan Di Posyandu (Gerbangmas Siaga) Di Kabupaten Lumajang (Studi Kasus Pada Gerbangmas Bougenville Rw 20 Kelurahan Citrodiwangsan, Kabupaten Lumajang). *Publika*, 9(1), 215–226.

- <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p215-226>
- Gustian, H., Jaenudin, J., Eosina, P., Teknik, J., Teknik, F., Ibn, U., Bogor, K., Kh, J., Km2, S. I., & Bogor, K. (2019). Sistem Informasi Forum Diskusi Layanan Mandiri Online Warga Rw09 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. *IKRA-ITIH INFORMATIKA : Jurnal Komputer Dan Informatika*, 3(1), 46–54. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/297>
- Ibrahim, M., & Sutrisno, S. (2023). Pengembangan Sekolah Kampung Pangea Kecamatan Wonosari, Provinsi Gorontalo. *SEGAWATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 30–40.
- Indonesia, R. (2017). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*.
- Indriyawati, N., Jannah, M., & Saptiwi, B. (2019). Poltekkes Kemenkes Semarang Wujudkan Gaya Hidup Sehat Melalui Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Di Jawa Tengah. *Link*, 15(1), 42. <https://doi.org/10.31983/link.v15i1.4396>
- Jaziri, R., Alnahdi, S., & Dhrifi, A. (2018). Public Health Effect of Financial Crisis and Governance: Evidence from Asian Countries. *International Journal of Scientific Study*, 6(9), 29–37. <https://doi.org/10.17354/ijss/2018/331>
- Juiz, C., Guerrero, C. and L. (2014). Implementing good governance principles for the public sector in information technology governance frameworks. *Journal of Accounting*, 3(2), 9–27.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018a). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2018*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018b). Laporan Riskesdas Provinsi Kalimantan Timur. In *Kementrian Kesehatan RI*. <https://drive.google.com/drive/folders/1XYHFQuKucZIwmCADX5ff1aDhfjggzI-l>
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2017). *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*.
- Khumairah, P. V., Angraeni, R., & Darwis, D. (2022). Advokasi Kesehatan. *Jurnal Kesehatan USIMAR*, 1(1), 1–13. <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/JKUSIMAR/article/view/317/185>
- Lolo, L. L., Kurnia, S., Persada, J., Kurnia, S., & Persada, J. (2022). Pendidikan Kesehatan Berbahasa Daerah Terhadap Kepatuhan Lansia Melakukan Pencegahan Peningkatan Tekanan Darah. *Jurnal Endurance*, 6(1), 190–200. <https://doi.org/10.22216/jen.v6i1.194>
- Magnusson, R. S., & Patterson, D. (2014). The role of law and governance reform in the global response to non-communicable diseases. *Globalization and Health*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.1186/1744-8603-10-44>
- Manalu, P., Gultom, D., Hutabarat, V. P., Andari, S., & Sitepu, V. (2020). Efektivitas Media Promosi Kesehatan Dalam Peningkatan Pengetahuan Siswa Bahaya Seks Bebas. *Jurnal Jumantik*, 5(2), 147–157.
- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 2(11), 929–941. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v2i11.474>
- Maydianasari, L.-, & Ratnaningsih, E.-. (2021). Analisis Kebutuhan Media Promosi Kesehatan Layanan Provider Initiated Testing and Counseling (PITC) bagi Ibu Hamil. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.61700>
- McCollum, R., Limato, R., Otiso, L., Theobald, S., & Taegtmeier, M. (2018). Health system governance following devolution: Comparing experiences of decentralisation in Kenya and Indonesia. *BMJ Global Health*, 3(5), 1–11. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-000939>
- Nadhirah, A. A. H., & Wirasari, I. (2020). Perancangan Kampanye Pencegahan Alergi Pada Anak Designing of Health Campaign for Allergy Prevention in Children Witk 3K Method in Bandung. *E-Proceeding of Art & Design*, 7(2), 1743–1749.
- Nopiani. (2019). Implementasi Program

- Pembangunan Di Bidang Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 130–134.
- Noviyanti, S., Candradewini, C., & Dai, R. M. (2021). Implikasi Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. *Responsive*, 3(4), 207. <https://doi.org/10.24198/responsive.v3i4.34264>
- OECD, O. for E. C. and D. (2009). *Government at glance*. <http://www.oecd.org>
- Paramita, A., Kristiana, L., & Kristanto, A. Y. (2018). Analisis Biaya Kesehatan Kegiatan Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Tingkat Puskesmas Dalam Menyukkseskan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(3), 163–171. <https://doi.org/10.22435/hsr.v21i3.407>
- Pramudita, Renata Winna. Megawati, S. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI APLIKASI JAWA TIMUR BELANJA ONLINE (JATIM BEJO) DI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR Suci Megawati Abstrak. *Publika*, 11(3), 2203–2214.
- Puluhulawa, I. (2013). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Status Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Palu Selatan. *E-Jurnal Katalogis*, 1(3), 15–25.
- Rahmadani, A. N., Surjoputro, A., & Budiyaniti, R. T. (2021). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penderita Diabetes Mellitus Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 9(2), 149–156. <https://doi.org/10.14710/jkm.v9i2.29427>
- Sagan, A. (2021). Health system resilience during the pandemic: it's mostly about governance. *Eurohealth*, 27(1), 10–15.
- Wajdy, F., Tawe, A., & Natsir, U. D. (2023). ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF TERHADAP BUDAYA Organisasi dan Produktivitas Kerja Pegawai pada Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (P2P) Sulawesi II. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi*, 1(2), 73–76.
- WHO. (2018). Noncommunicable Disease. In *World Health Organization*. <https://doi.org/10.1002/9781119097136.part5>
- Widiowati, B., & Pramutanto, W. (2021). Strategi Pemenangan Caleg Partai Gerindra Dalam Pemilu Legislatif 2019: Studi Kasus Bambang Pujiyanto Dapil 2 Sidoarjo. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 6(2), 72–80. <https://doi.org/10.20473/jpi.v6i2.30420>